

DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT

TERHADAP FILIPINA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Oleh: Doli Nugraha Harahap

20140510301

A. Latar Belakang

Amerika Serikat yang dikenal dengan “*Global Foreign Policy*” nya memang sering kali bertindak sebagai polisi dunia. Kemunculan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II sebagai negara terkuat di dunia masih bertahan hingga saat ini. Kekuatan militer dan ekonomi negara yang terletak di benua Amerika tersebut cukup membuktikan bahwa Amerika Serikat masih menjadi negara *superpower* dengan cakupan *Sphere of Influence (SOI)* yang cukup luas, sehingga muncullah istilah *America’s Backyard*. (Debusman, 2008)

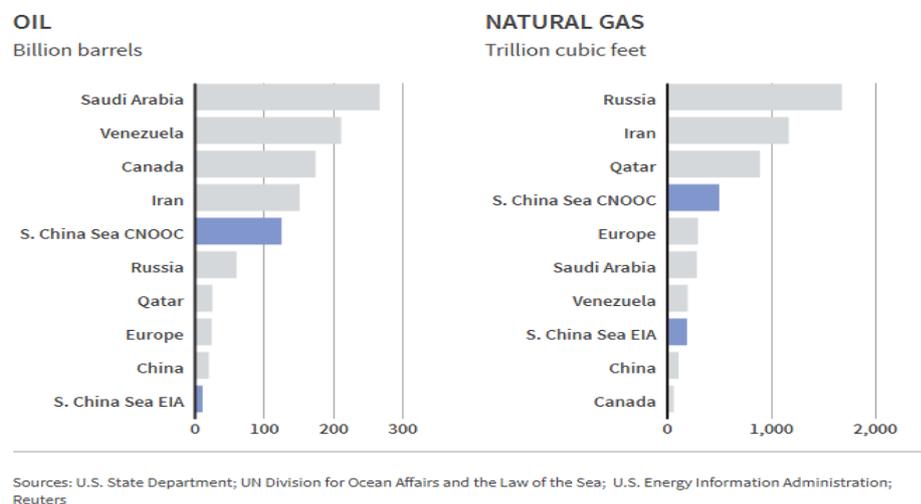
Kekuatan militer Amerika Serikat menempati peringkat pertama dari 133 negara menurut PwrIndx dengan rating 0.0857 (dengan asumsi 0.0000 nilai sempurna). (GlobalFirePower.com, 2017) Bahkan, dengan kekuatan militer yang sedemikian rupa, Uni Eropa mengandalkan Amerika Serikat dalam urusan keamanannya melalui NATO. Posisi Amerika Serikat di mata dunia sebagai negara terkuat juga memungkinkan Amerika Serikat melakukan manuver-manuver politik di luar kedaulatan wilayah negaranya.

Keputusan Amerika Serikat untuk turut masuk kedalam konflik Laut China Selatan antara China dan negara-negara di sekitar wilayah sekitarnya masih dipertanyakan. Sebagai negara yang letak geografisnya sangat jauh, yakni Amerika Serikat berada di benua Amerika, sedangkan Laut China Selatan berada di kawasan benua Asia, menjadikan status Amerika Serikat sebagai negara non-klaim dalam konflik tersebut.

Laut China Selatan merupakan wilayah laut terbesar kelima setelah empat samudera dunia. Menjadi bagian dari Samudera Pasifik, Laut China Selatan memiliki 10 % dari sumber daya perikanan dunia. Sebesar 30 % jalur perdagangan dunia melintasi kawasan perairan ini menjadikan Laut China Selatan sebagai jalur laut paling penting di Asia-Pasifik. Kawasan Laut China Selatan menjadi perebutan dan saat ini sedang disengketakan oleh negara-negara di sekitarnya untuk memperebutkan wilayah laut ini.

Selain merupakan jalur perdagangan yang penting dalam aktivitas perdagangan dunia, Laut China Selatan juga menjadi salah satu wilayah yang banyak mengandung sumberdaya lepas pantai (*off-shore*). Laut China Selatan merupakan wilayah terbesar ke-5 penghasil minyak bumi, dan terbesar ke-4 penghasil gas alam. Fakta ini kemudian menjadi faktor yang menambah wilayah yang bersengketa semakin bersikeras mempertahankan klaim wilayahnya atas Laut China Selatan. Berikut tabel yang menjelaskan data tersebut:

Table 1.1 Wilayah dengan ketersediaan *offshore resources*



Terdapat 9 negara yang mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah perairan laut mereka, tetapi yang menjadi konsen saat ini adalah persengketaan antara 6 negara, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, serta China dan Taiwan. 4 negara di Asia Tenggara mengklaim wilayah laut mereka berdasarkan hasil konvensi UNCLOS (Breadth of

the exclusive economic zone, 1973), dimana telah diatur bahwa wilayah 200 Mil dari garis pantai atau disebut dengan ZEE adalah patokan batas kedaulatan negara di wilayah perairan. Namun China dilain sisi menggunakan apa yang mereka sebut sebagai *nine-dash line* sebagai referensi patokan batas wilayah perairan mereka. Yang menjadi masalah kemudian karena *nine-dash line* yang digunakan China melanggar ZEE dari negara-negara lain. Meskipun China adalah salah satu negara yang meratifikasi hasil konvensi UNCLOS namun China memilih untuk tidak mematuhi hasil tersebut, mereka berargumen bahwa *nine-dash line* yang mereka miliki mempunyai hubungan sejarah kuat dengan masa eksplorasi ketika dynasti China berkuasa. (Tweed, 2016)

Nine-dash line pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Kuomintang, dan pada saat Jepang menyerah dan keluar dari China setelah kekalahan di Perang Dunia ke II, China dengan segera mengklaim ulang *nine-dash line* dan digunakan sampai sekarang. (Liu, 2016) *Nine-dash line* ini pula yang menjadi landasan pembenaran China melakukan eksplorasi diluar batas wilayah ZEE miliknya dan melanggar batas-batas wilayah ZEE negara-negara lain. Meskipun UN telah memperingatkan China untuk mematuhi hukum Internasional yang berlaku, namun China tidak bergeming ataupun memberi respons. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan kasus atas tindakan China yang membangun pangkalan militer didalam wilayah kedaulatan mereka, dan pada tahun 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional menetapkan bahwa China harus keluar dari wilayah kedaulatan Filipina karena *nine-dash line* yang mereka gunakan sebagai patokan tidak memiliki legal hukum.

Namun China, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri nya, mengatakan bahwa “China tidak akan pernah menuruti hasil persidangan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tidak mengikat, dan China akan mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai wilayah kedaulatannya dengan serius dan akan mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatannya” (Hunt, 2016). Keseriusan China tentang pernyataannya diikuti

dengan pembangunan pangkalan militer secara masif di kepulauan Spratly, setidaknya ada 7 pulau karang yang berhasil direklamasi oleh China dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.(Watkins, 2016)Hal ini mendapat respons negatifbaik dari negara pengklaim yang bersengketa secara langsung dengan China maupun negara non-klaim yang tidak memiliki keterkaitan dengan sengketa wilayah yang terjadi.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara berstatus non-klaim yang turut merespons tindakan China tersebut.Melalui pernyataan *State Department* nya, Amerika ikut menolak klaim *nine-dash line* China atas wilayah di Laut China Selatan.(United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, 2014)Mengutip dari artikel yang dirilis oleh *Department States* Amerika Serikat No. 143, “*Limits in the Seas*”, menyatakan bahwa; *A State making a historic claim must give international notoriety to such a claim.*¹Pernyataan tersebut merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat kepada negara-negara yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan. Dilanjutkan dengan; *As stated in a recent comprehensive study on historic waters, “formal notification of such [a historic] claim would seem normally to be necessary for it to attain sufficient notoriety; so that, at the very least, other States may have the opportunity to deny any acquiescence with the claim by protest etc.”*(Simmons, Clive R, 2008). Sehingga memperjelas penolakan Amerika Serikat atas klaim China dan dukungan agar negara-negara yang dimaksud melakukan protes atas klaim tersebut.

Amerika mulai melakukan langkah nyata sebagai bentuk penolakan atas klaim China di Laut China Selatan. Beberapa manuver-manuver politik dilakukan Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia Tenggara yang berkonflik di kasus tersebut, salah satunya adalah manuver politik Amerika lewat motif melindungi aliansinya dengan Filipina. Pada tahun

¹ Pernyataan berdasarkan UN Study, *supra* note 20, at paras. 125-130 (concluding that there are “strong reasons for holding that notoriety of the exercise of sovereignty . . . is required . . .”) dan para. 96

2016, Amerika dan Filipina menandatangani perjanjian kerjasama militer, Amerika menempatkan pasukan militer tidak permanen sebagai bentuk pemenuhan janji Amerika untuk melindungi interest sekutunya.

Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin aliansi sejak lama, dimulai pada Maret tahun 1947 ketika duta besar Amerika Serikat untuk Filipina, Paul McNut dan Presiden Filipina saat itu, Manuel Roxas, menandatangani perjanjian *Military Base Agreement* yang memberi akses bagi Amerika Serikat untuk membangun lebih dari selusin pangkalan militer di Filipina. Dilanjutkan pada tahun 1951 ketika kedua negara menyepakati *Mutual Defense Treaty* yang semakin memperkuat hubungan aliansi kedua negara.(Albert, *The U.S-Phillipines Deffense Alliance*, 2016)

Selain menjadi sekutu Amerika yang paling lama di Asia-Pasifik, Filipina, mengutip pernyataan Ernest Bower, Senior Advisor, Center for Strategic and International Studies, menjadi *cornerstone* atau basis Amerika Serikat dalam politik luar negerinya di Asia-Pasifik. Penguatan hubungan antara kedua negara merupakan salah satu dari langkah besar politik luar negeri Amerika Serikat di Asia untuk mencapai apa yang disebut dengan *rebalance* atau penyeimbangan poros dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Puncaknya, pada tahun 2014, kedua negara menandatangani *Enhanced Defense Cooperation Agreement* sebagai bentuk komitmen kerjasama melakukan tindakan preventif atas klaim China di wilayah Laut China Selatan

B. Pokok Permasalahan

Melalui paparan diatas, maka penulis mendapati sebuah pertanyaan: “Mengapa Amerika Serikat mendukung Filipina dalam konflik Laut China Selatan?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu menganalisa masalah, penulis memilih beberapa teori dan konsep dibawah:

1. Konsep *Offshore Balancing*

Peralihan kekuatan yang signifikan yang terjadi dalam politik dunia tidak bisa disangkal telah terjadi secara berulang kali. Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya negara yang sedang memegang status negara *superpower* saat itu, melakukan langkah preventif untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya demi menjaga kestabilan ekonomi dan politiknya.

Salah satu jenis langkah preventif tersebut disebut dengan *Offshore Balancing*. Konsep tersebut merupakan alternatif dari teori *Grand Strategy*, dimana strategi didalam teori tersebut dibagi dalam tiga langkah, yaitu; menentukan kepentingan vital dari keamanan negara, mengidentifikasi ancaman yang ada, dan kemudian menentukan seberapa besar kekuatan militer yang dibutuhkan untuk melindungi *interest* tersebut. (Christopher, 1997)

Offshore Balancing dinilai lebih memiliki kemungkinan riskan yang kecil, seperti terjadinya perang besar (perang nuklir), dan kesempatan untuk meningkatkan pengaruh didalam politik internasional. Karena sistem kerja dari strategi *Offshore Balancing* ini sendiri adalah dengan cara menyeimbangi hegemoni suatu negara yang berpotensi menjadi *new power* di suatu wilayah dengan cara turut andil dalam kegiatan ekonomi maupun politik di wilayah tersebut.

Dalam kasus ini, Amerika Serikat menerapkan strategi *Offshore Balancing* terhadap China yang memang telah terbukti menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. China telah menguasai pasar dunia mengalahkan Amerika Serikat dari segi PPP. Untuk menerapkan

strategi ini, Amerika Serikat mengambil beberapa langkah untuk dapat mengawasi perkembangan China, salah satunya adalah dengan menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik.

Pada masa kepemimpinan Obama, sebuah program bernama “Pivot to Asian” (atau Poros Asia) diperkenalkan sebagai salah satu strategi meredam perkembangan China di Asia. *Trans Pacific Partnership* (TPP) ditandatangani sebagai bentuk perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia-Pasifik. Ini disebut dengan strategi Interdependence yang juga termasuk kedalam strategi dari *Offshore Balancing* Amerika Serikat. (Christopher, 1997)

Hal ini yang kemudian menjadi landasan bagi China untuk sebisa mungkin menguasai Laut China Selatan, yang merupakan jalur utama dari perdagangan di Asia-Pasifik sebagai respons *counterbalance* dari TPP yang dibentuk oleh Amerika Serikat. (Krishna, 2014) Namun langkah China untuk menguasai Laut China Selatan tersebut mendapat respons negatif keras dari negara-negara sekitarnya, dan juga dari Amerika Serikat yang tengah menjalankan program Poros Asia tersebut.

Salah satu strategi yang digunakan Amerika Serikat untuk membuka jalan melakukan pengamanan pengaruhnya di kawasan tersebut adalah dengan memanfaatkan aliansinya dengan Filipina. Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin aliansi sejak lama, dimulai pada Maret tahun 1947 ketika duta besar Amerika Serikat untuk Filipina, Paul McNut dan Presiden Filipina saat itu, Manuel Roxas, menandatangani perjanjian *Military Base Agreement* yang memberi akses bagi Amerika Serikat untuk membangun lebih dari selusin pangkalan militer di Filipina. Dilanjutkan pada tahun 1951 ketika kedua negara menyepakati *Mutual Defense Treaty* yang semakin memperkuat hubungan aliansi kedua negara. (Albert, *The U.S-Phillipines Defense Alliance*, 2016)

Selain menjadi sekutu Amerika yang paling lama di Asia-Pasifik, Filipina, mengutip pernyataan Ernest Bower, Senior Advisor, Center for Strategic and International Studies, menjadi *cornerstone* atau basis Amerika Serikat dalam politik luar negerinya di Asia-Pasifik. Penguatan hubungan antara kedua negara merupakan salah satu dari langkah besar politik luar negeri Amerika Serikat di Asia untuk mencapai apa yang disebut dengan *rebalance* atau penyeimbangan poros dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik atas China dan pengaruhnya dikawasan itu.

2. Teori National Interest

Bagi kaum realis klasik, kepentingan nasional merupakan petunjuk dasar kebijakan luar negeri yang bertanggung jawab: ini merupakan pemikiran moral yang harus dipertahankan dan dimajukan oleh para pemimpin negara. Namun bagi kaum neorealis, kepentingan nasional terlihat bergerak seperti sinyal otomatis yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak.(Jackson & Sorensen, 2013, p. 140).

Morgenthau yang mewakili kaum realis, melihat negara-negara sebagai organisasi-organisasi yang dipandu oleh para pemimpin yang kebijakan luar negerinya berhasil atau tidak berhasil, tergantung pada kelihaihan dan kebijaksanaan keputusan mereka.Sedangkan menurut Waltz, yang mewakili kaum neorealis, beranggapan bahwa negara-negara sebagai robot yang merespons terhadap keterbatasan impersonal dan mendikte sistem internasional.Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan nasional adalah landasan dari sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan tersebut harus dapat mencapai target yang dibutuhkan oleh negara. Sedangkan kebutuhan yang dimaksudkan tersebut adalah kebutuhan masyarakat umum (*public interest*) di dalam negara tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat disebut dengan *basic national interest*, yaitu terdiri dari:

(i) *Defence interest*: yaitu jaminan keselamatan negara dan penduduknya dari ancaman fisik dari negara lain dan/atau ancaman eksternal atas sistem politik negara tersebut

(ii) *Economic interest*: peningkatan keadaan ekonomi negara melalui kerjasama dengan negara lain

(iii) *World order interest*: menjaga sistem politik dan ekonomi yang dianut negara tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan

(iv) *Ideological interest*: pelestarian nilai-nilai diatas (poin iii) agar negara lain ikut menganut nilai-nilai tersebut sehingga tercipta rasa aman dan tercapai kestabilan antar negara yang sama-sama menganut nilai tersebut. (Nuechterlein, 1976)

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah seperti pemaksaan dengan kekuatan, membatasi perdagangan, ataupun melalui kerjasama aliansi antar negara untuk menerapkan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka dapat diketahui, setiap kebijakan yang diambil oleh sebuah negara, pada dasarnya adalah untuk menjaga kelangsungan negara tersebut agar tetap aman dan stabil.

Pada kasus Laut China Selatan, masuknya Amerika Serikat kedalam konflik ditengarai karena adanya *interest* yang dimiliki Amerika Serikat atas konflik tersebut. Jika yang menjadi tujuan Amerika Serikat adalah cadangan sumber daya minyak bumi didalam Laut China Selatan, maka dapat diartikan pemenuhan *Economic interest* adalah target utama Amerika Serikat di dalam kebijakan tersebut. Namun begitu, keputusan untuk masuk kedalam konflik tersebut dapat mencederai hubungan dagang Amerika Serikat dengan China, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *interest* Amerika Serikat bukanlah sebatas pemenuhan *Economic interest* nya atas cadangan gas alam dan minyak bumi di Laut China Selatan.

Terdapat indikasi-indikasi bahwa apa yang sebenarnya menjadi kepentingan Amerika Serikat di Laut China Selatan adalah *World order interest*, mengingat dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, posisi Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dunia mulai melemah, ditandai dengan China yang mengungguli Amerika Serikat dalam PPP dan berhasil menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Maka keputusan Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan demi mempertahankan kedudukannya adalah alasan yang dapat dianggap paling rasional.

D. Hipotesa

Amerika Serikat mendukung Filipina dalam konflik Laut China Selatan, karena:

1. Posisi strategis Filipina didalam konflik Laut China Selatan dapat membantu memenuhi *Economic interest* Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan. Sebesar 14% dari total perdagangan laut Amerika Serikat memanfaatkan jalur Laut China Selatan. Perdagangan di kawasan Laut China Selatan bagi Amerika Serikat sendiri sangat vital, setiap tahunnya, 208 miliar USDollar nilai barang perdagangan Amerika Serikat melewati jalur Laut China Selatan.
2. Posisi strategis Filipina dapat digunakan untuk memenuhi *World order interest* Amerika Serikat di Laut China Selatan. Amerika Serikat mengkhawatirkan negara-negara Asia berpaling ke arah China sebagai kiblat ekonominya, dan jika China berhasil menguasai Laut China Selatan, maka pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia akan hilang sepenuhnya. Maka Amerika Serikat merasa perlu mengawasi China untuk mencegah hal ini terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis alasan dibalik kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mendukung Filipinadidalam konflik Laut China Selatan dan memahami tujuan utama

Amerika Serikat melakukan manuver politik terhadap kebijakan politik luar negeri China atas klaimnya di Laut China Selatan

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Jatmika, 2016). Pengumpulan informasi dalam metode ini menggunakan fakta-fakta dari data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, website dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya

G. Bahasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai sejak terjadinya konflik Laut China Selatan saat dimana China melakukan klaim melalui *nine-dash line* nya dan berlanjut hingga saat Amerika melakukan tindakan langsung sebagai langkah intervensi atas tindakan China.

KEPENTINGAN HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DI LAUT CHINA SELATAN

Untuk memahami alasan Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Filipina dalam konflik Laut China Selatan, sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai Teori Kepentingan Negara di dalam BAB I. Dalam paparan disebutkan bahwa sebuah negara akan melakukan tindakan melalui kebijakan politik luar negerinya demi memenuhi *interest-interest* yang harus dicapainya demi menjaga stabilitas didalam negaranya. Amerika Serikat,

lewat kebijakannya mendukung Filipina dalam konflik Laut China Selatan juga memiliki *interest-interest* yang harus dipenuhinya. Perealisan *interest-interest* itu yang kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat menerapkan kebijakan tersebut, maka pada bab ini penulis akan membahas tentang *interest* Amerika Serikat didalam konflik Laut China Selatan.

A. Posisi Filipina Dalam Kepentingan Economic Interest Amerika Serikat dikawasan Laut China Selatan

Jalur perdagangan laut merupakan jalur utama perdagangan dunia, sebanyak 80% volume jalur perdagangan dunia merupakan jalur laut. Menurut estimasi yang dilakukan oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), jalur laut memegang 70% nilai perdagangan dunia. Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya jalur laut bagi kelangsungan ekonomi dunia.

Dari jumlah volume itu, 60% jalur perdagangan laut melewati kawasan Asia, dimana Laut China Selatan menjadi jalur utama perdagangan laut di kawasan tersebut dan memegang 1/3 bagian dari seluruh jalur perdagangan dunia. Jalur Laut China Selatan merupakan jalur penting bagi negara-negara ekonomi kuat dunia (CSIS, 2016), seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah:

Table 4.1 Jalur perdagangan negara-negara di Laut China Selatan

Country	% Share of World GDP	Trade Value through South China Sea (USD billions)	South China Sea Trade As % of All Trade in Goods
United States	24.5	208	5.72
China	14.8	1470	39.5
Japan	6.53	240	19.1
Germany	4.58	215	9.00
United Kingdom	3.46	124	11.8
France	3.26	83.5	7.77
India	2.99	189	30.6
Italy	2.45	70.5	8.14
Brazil	2.37	77.3	23.4
Canada	2.02	21.8	2.67

CSIS ChinaPower Project | International Monetary Fund

Keberadaan jalur laut di kawasan Laut China Selatan bagi Amerika Serikat sendiri sangat vital, setiap tahunnya, 208 miliar USDollar nilai barang perdagangan Amerika Serikat melewati jalur Laut China Selatan. Meskipun Amerika Serikat tidak terlalu bergantung pada jalur laut tersebut jika dibandingkan dengan China yang secara persentase yang mengandalkan jalur Laut China Selatan sebesar 64%, namun Amerika Serikat tidak mungkin berdiam diri dan tidak melakukan tindakan jika 14% jalur perdagangan lautnya terancam dengan ambisi China yang ingin menguasai jalur laut tersebut.

Disamping itu, keterlibatan Amerika Serikat didalam konflik itu juga menyangkut dengan adanya cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah di bawah kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat telah dikenal sebagai negara yang “haus” jika menyangkut dengan sumber daya minyak bumi. Politik luar negeri Amerika Serikat sendiri notabene mengacu pada perburuan sumber daya minyak bumi. Kebutuhan Amerika Serikat akan minyak bumi begitutinggi sehingga tujuan untuk menguasai cadangan sumber daya yang ada

di Laut China Selatan terlihat begitu jelas. Sumber daya minyak bumi di Laut China Selatan paling banyak berada di wilayah yang bernama “lidah sapi”.Sebelumnya wilayah tersebut berada dalam kawasan wilayah laut internasional dan Amerika Serikat masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Namun jika China berhasil menguasai kawasan tersebut, maka Amerika Serikat akan kehilangan kesempatan tersebut.

Amerika Serikat telah menguasai perekonomian dalam kurun waktu lebih kurang satu abad lamanya. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank pada tahun 2016, Amerika Serikat menyumbang sebesar 24,5% dari jumlah total GDP di dunia. Namun fakta tersebut bukan berarti Amerika Serikat masih menempati posisi negara dengan perekonomian terkuat dunia.Baik IMF maupun World Bank sama-sama menempatkan China sebagai negara dengan perekonomian terkuat dunia saat ini.

Penilaian tersebut berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) China yang berhasil mengungguli Amerika Serikat.PPP merupakan sebuah tolak ukur kesanggupan GDP sebuah negara dalam transaksi nilai mata uang yang berbeda, atau lebih tepatnya fleksibilitas mata uang tersebut dalam sebuah transaksi diluar negara asalnya.Perekonomian China terus menguat dikarenakan keunggulan tersebut.Selain itu, IMF dan World Bank juga memprediksikan bahwa selain unggul dari Amerika Serikat dalam segi PPP, China juga memiliki potensi untuk mengungguli perekonomian Amerika Serikat dalam aspek-aspek lain. Bahkan, The Centre for Economics and Business Research (Cebr) juga telah memprediksikan bahwa pada tahun 2029, China akan mengambil alih keseluruhan perekonomian dunia dan akan mengalahkan Amerika Serikat dalam seluruh aspek. (Centre for Economic and Business Research, 2016)

dapat meminimalisir biaya *shipping* barang-barang dagangnya. Dengan begitu China bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan akan semakin menguatkan ekonominya. Selain itu, setiap *trade route* yang melewati Laut China Selatan harus membayar pajak kepada China jika wilayah laut itu berada dibawah kekuasaan China. Mengingat betapa padatnya volume perdagangan yang melewati jalur Laut China Selatan, maka *custom tax* dari jalur perdagangan itu akan menjadi tambahan pemasukan yang amat menjanjikan bagi perkembangan ekonomi China.

Selain itu, China juga sangat membutuhkan cadangan minyak bumi dan gas alam yang berada dibawah Laut China Selatan. Saat ini, China mengkonsumsi hampir dari 10% dari seluruh cadangan minyak bumi yang dihasilkan diseluruh dunia, sementara cadangan yang dimiliki China hanya memenuhi 1,1% dari kebutuhannya tersebut. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang menjadi isu penting bagi seluruh negara di dunia, khususnya negara-negara industri besar seperti China dan Amerika Serikat. Jika salah satu dari negara itu berhasil menguasai cadangan minyak bumi di Laut China Selatan, maka pihak satunya akan mengalami kerugian besar. Jika China berhasil mengklaim Laut China Selatan, Amerika Serikat tidak lagi bisa mengeruk sumber daya dikawasan itu lagi, China juga bisa mendapat surplus dengan mengurangi impor minyak bumi dari negara lain karena sudah memiliki sumber daya sendiri. Sebaliknya jika Amerika Serikat berhasil mencegah klaim China atas Laut China Selatan, artinya China akan kehilangan peluang untuk menguasai sumber daya didalamnya. Jika China gagal menguasai sumber daya tersebut, China masih harus mengimpor minyak bumi dari negara lain.

Amerika Serikat memutuskan untuk masuk kedalam konflik Laut China Selatan agar tujuan-tujuan China didalam Laut China Selatan tidak terpenuhi. Jika klaim China tersebut gagal, maka tujuan China untuk menguasai jalur perdagangan di Laut China Selatan akan gagal. China tidak akan mendapatkan surplus dari pengurangan biaya *shipping* maupun

surplus dari *custom tax* dari jalur perdagangan itu. Tujuan China untuk menguasai sumber daya minyak bumi di dalam Laut China Selatan pun juga akan gagal, maka untuk memenuhi defisit kebutuhan minyaknya tersebut, China harus membeli dari negara lain. Dengan kata lain, apabila klaim China atas Laut China Selatan gagal, ekspektasi perkembangan ekonomi China tidak akan sepesat jika klaim tersebut berhasil.

Lewat pemaparan-pemaparan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan Amerika Serikat masuk kedalam konflik Laut China Selatan merupakan suatu bentuk upaya untuk mencegah ekonomi China berkembang lebih pesat lagi. *Economic interest* Amerika Serikat didalam konflik Laut China Selatan adalah untuk memenangi *economic race* dengan China dan mempertahankan posisinya sebagai negara ekonomi terkuat dunia. Dengan spekulasi bahwa negara-negara yang saat ini menjadi mitra Amerika Serikat akan berpaling kepada China jika China berhasil menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara ekonomi terkuat dunia, maka hal itu dapat mengancam pengaruh Amerika Serikat dimata dunia, bahkan akan mengancam kelangsungan ekonomi dan stabilitas Amerika Serikat. Maka dari itu Amerika Serikat harus mencegah China untuk menguasai Laut China Selatan.

Baik Amerika Serikat dan China tentu sama-sama menyadari bahwa perang bukanlah sebuah pilihan yang dapat diambil. Kerugian besar akan dialami oleh kedua negara tanpa hasil yang sepadan. Apalagi Amerika Serikat telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam *cold war* melawan USSR, tentu Amerika Serikat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk menambah daftar panjang hutang Amerika Serikat akibat kerugian perang.

Selain itu, Amerika Serikat juga harus menghindari resiko kehilangan kerjasama perdagangannya dengan China. Banyak produsen dari Amerika Serikat yang menggantungkan produksinya pada China, apabila China memutuskan untuk menutup

hubungan dagang dengan Amerika Serikat, maka produksi Amerika Serikat akan menurun drastis dan dapat mengancam stabilitas ekonominya.

Amerika Serikat dan China terikat dalam hubungan perdagangan yang sangat besar, angka 590 miliar USDollar adalah nilai kerugian yang harus ditanggung oleh kedua negara jika hubungan perdagangan bilateral itu terputus apabila terjadi konfrontasi langsung antar dua negara tersebut. Amerika Serikat dan China sama-sama mempengaruhi satu sama lain dalam bidang ekonomi, banyak produsen-produsen besar dari Amerika Serikat seperti General Motors, Boeing, dan Apple mengandalkan China sebagai lokasi produksi mereka, sedangkan China juga bergantung pada pasar Amerika Serikat untuk memasarkan produk-produk mereka.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah Amerika Serikat tidak boleh mengambil langkah yang salah karena akan menimbulkan resiko terlalu besar bagi hubungannya dengan China. Amerika Serikat memerlukan strategi yang tepat agar *interest* nya tetap terpenuhi tetapi tidak memicu konflik secara langsung dengan China. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan hubungan aliansinya dengan Filipina.

Filipina merupakan salah satu negara klaim dalam konflik Laut China Selatan. Selain karena memiliki wilayah kedaulatan di kawasan itu, Filipina juga terlibat konflik langsung dengan China dalam sengketa wilayah laut sebelah barat Filipina yang di juga klaim oleh China. Dalam kasus yang diajukan Filipina melawan China di Mahkamah Arbitrase Internasional, Amerika Serikat memberikan dukungan dan desakan agar China tunduk pada keputusan yang memenangkan Filipina tersebut. Hal seperti tidak akan mengancam hubungan Amerika Serikat dengan China karena masih dalam ranah hukum internasional dan China tidak mungkin menunjukkan penolakan secara subyektif pada Amerika Serikat. Hal-

hal seperti inilah yang diperlukan Amerika Serikat untuk menekan China tanpa merusak hubungannya dengan China.

B. Posisi Filipina Dalam Kepentingan World Order Interest Amerika Serikat dikawasan Laut China Selatan

Kebangkitan China dalam dua dekade terakhir sedikit banyak telah mengubah *power position* di Asia. China telah menjadi partner ekonomi utama bagi hampir semua negara-negara di Asia. Pergeseran kiblat ekonomi ini tentu mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat, seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, Amerika Serikat berupaya sebisa mungkin untuk menghambat pertumbuhan ekonomi China. Selain bersaing dalam *economic race*, China dan Amerika Serikat sama-sama bersaing untuk satu hal penting lainnya, yaitu *World order interest*.

Hegemoni Amerika Serikat didalam tatanan dunia tidak terbantahkan lagi. Sebagai pihak yang selalu memenangi berbagai perang, baik Perang Dunia II dan *Cold-war*, Amerika Serikat muncul sebagai suatu entitas yang bertindak sebagai pemimpin dan pelindung bagi negara-negara yang menggantungkan kelangsungannya di bawah Amerika Serikat. Amerika Serikat berhasil menciptakan suatu fatamorgana bahwa dibawah kepemimpinannya dunia seakan-akan telah mencapai suatu zaman keemasan dan kedamaian. Hal itu dikarenakan setiap standar kedamaian dan stabilitas yang dimengerti oleh seluruh dunia merupakan ideologi “demokrasi liberal” dari Amerika Serikat sendiri.

Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap kebijakan luar negeri yang diambilnya merupakan keputusan yang terbaik dan dinilai akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Lewat delusi kedamaian yang dipromosikannya, Amerika Serikat seringkali bertindak destruktif dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sebagai contoh nyata adalah ketika Amerika Serikat melakukan agresi untuk mengintervensi negara-negara

seperti dalam kasus Yugoslavia, Iraq, dan Afghanistan. Tindakan-tindakan tersebut, meskipun terlihat nyata bersifat merusak, namun akan selalu mendapatkan pembenaran di mata dunia, karena Amerika Serikat selalu mengatasnamakan “perdamaian” yang diciptakan olehnya sendiri dalam setiap tindakannya.

Tatanan dunia saat ini bersifat unipolar dan relatif kacau karena banyak negara-negara yang akan melakukan apa saja demi mencapai kepentingannya sendiri. Meski demikian, Amerika Serikat masih menjadi kiblat kekuatan dunia sebagai pemegang pengaruh terbesar di dunia. Terbukti dengan betapa posisi Amerika Serikat amat menentukan didalam UN. UN yang seharusnya menjadi pihak netral cenderung mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat, hal ini terjadi karena Amerika Serikat merupakan pemegang separuh kekuatan yang dimiliki oleh UN. Lewat NATO, Amerika Serikat memainkan peran sebagai polisi dunia dan menentukan pihak mana yang benar dan pihak mana yang harus dihancurkan.

Selama dua dekade lamanya Amerika Serikat memainkan peran tersebut tanpa ada pesaing yang dapat meredamnya. Rusia tidaklah sekuat USSR sebelumnya, sedangkan Eropa sendiri menggantungkan kelangsungan hidupnya ditangan Amerika Serikat. Hal ini terus berlanjut, sampai pada saat ketika China muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dunia dan hadir sebagai penantang baru bagi pengaruh Amerika Serikat di dunia.

Baik Amerika Serikat maupun China sama-sama memiliki sisi historis sebagai negara yang menanamkan hierarki ke negara-negara sekitarnya dan sama-sama memiliki kecenderungan untuk menempati posisi puncak hierarki tersebut. Pada masa imperialisnya, China mampu menguasai hampir seluruh kawasan Asia dibawah kekuasaannya. Meskipun pada tahun 2015, wakil menteri luar negeri China, Fu Ying, menyatakan bahwa China tidak memiliki tujuan untuk menguasai suatu kawasan diluar kedaulatan negaranya karena itu akan

melanggar prinsip Westphalia yang telah menjadi landasan tatanan negara-negara di dunia, namun kebangkitan China tetap membawa kekhawatiran bagi negara-negara yang bertetangga dengannya.

China sendiri muncul sebagai kekuatan baru dunia pasca Perang Dunia II. Setelah Amerika Serikat membantu China untuk memperbaiki keadaan politik dan ekonominya, China perlahan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sampai akhirnya China berhasil muncul sebagai negara kedua di dunia dengan kekuatan ekonomi terkuat dibawah Amerika Serikat. Sebagai negara produsen terbesar di dunia, tentu saja China mendapatkan keuntungan berupa pengaruh diantara pihak-pihak yang memiliki kerjasama perdagangan dengan China. Bahkan, China saat ini memiliki pengaruh lebih besar dari Amerika Serikat dikawasan Asia Timur sampai Asia Tenggara, karena China merupakan sentral ekonomi dikawasan tersebut.

China bukan lagi negara yang bisa diatur oleh Amerika Serikat, karena China tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat dalam aspek apapun. Seruan Amerika Serikat agar China menghentikan klaim atas Laut China Selatan tidak digubris oleh China, ini merupakan bukti bahwa China tidak lagi takut akan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat. China benar-benar muncul sebagai kekuatan baru dunia yang sanggup menantang pengaruh kekuasaan Amerika Serikat di dunia.

Ini tentu bukan merupakan hal yang bagus bagi Amerika Serikat, dengan kebangkitan China, hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia semakin melemah. Meskipun Amerika Serikat masih memiliki sekutu-sekutu di kawasan itu, bukan berarti sekutu-sekutunya tidak akan berpaling kearah China jika Amerika Serikat tidak mampu meredam kekuatan China. Maka dari itu, Amerika Serikat merasa perlu untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki

kekuatan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin dunia dengan cara membela negara-negara yang berkonflik melawan China di Laut China Selatan.

Amerika Serikat memang memiliki kepentingan yang harus dipenuhi di Laut China Selatan. Namun Amerika Serikat tidak akan mengambil resiko untuk berhadapan langsung dengan China. Baik Amerika Serikat maupun China, sama-sama merupakan kekuatan besar di dunia. Kedua negara sama-sama memiliki kekuatan militer yang masif, meskipun Amerika Serikat mengungguli China secara statistik, namun jika kedua negara melakukan konfrontasi secara langsung, maka dapat dipastikan kedua negara akan mengalami kerugian yang besar, jika tidak sama-sama saling menghancurkan satu sama lain.

Maka Amerika Serikat perlu memastikan bahwa ia mampu mencegah klaim China atas Laut China Selatan, hal ini penting bagi Amerika Serikat jika masih ingin mempertahankan hegemoninya di Asia. Dengan harapan jika Amerika Serikat mampu mencegah klaim China tersebut, negara-negara di Asia akan tetap mengandalkan perlindungan dari Amerika Serikat dan tetap berada dibawah pengaruhnya.

Hubungan kedua negara ini begitu kompleks sehingga perang senjata akan menjadi pilihan terakhir bagi China maupun Amerika Serikat, karena selain akan menjadi titik kehancuran bagi kedua negara, juga akan mengganggu kestabilan seluruh dunia. Beberapa pengamat politik bahkan mengatakan jika konflik di Laut China Selatan terus berlanjut hingga Amerika Serikat dan China berkonfrontasi langsung dalam sebuah *armed race*, maka terjadinya Perang Dunia III tidak akan dapat terelakkan lagi

KESIMPULAN

Keputusan Amerika Serikat untuk masuk kedalam konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang terlalu riskan untuk diambil. Banyak yang mempertanyakan alasan Amerika Serikat berani mengambil resiko untuk merusak hubungannya dengan China, mengingat Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar dengan China.

Amerika Serikat dan China telah menjalin hubungan perdagangan yang masif, sehingga kedua negara sama-sama memiliki ketergantungan satu sama lain. Banyak produsen Amerika Serikat yang mengandalkan *cheap labour* milik China sehingga sebagian besar barang perdagangan Amerika Serikat amat mengandalkan China untuk memproduksinya. Begitu pula dengan China yang juga membutuhkan Amerika Serikat sebagai pangsa pasar dan penyedia lapangan kerja.

Meskipun Amerika Serikat menyatakan bahwa keterlibatannya di konflik tersebut merupakan bentuk dukungan dan tanggung jawabnya atas Filipina sebagai sekutunya, namun ada indikasi-indikasi lain yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan lain yang lebih besar yang melatarbelakangi alasannya untuk masuk kedalam konflik tersebut yaitu mempertahankan hegemoninya sebagai negara *superpower* yang juga terancam dengan kemunculan China sebagai negara kekuatan baru dunia. Selama dua dekade lamanya Amerika Serikat mempertahankan hegemoninya tersebut tanpa ada

pesaing yang dapat meredamnya. Sampai pada saat ketika China muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dunia dan hadir sebagai penantang baru bagi pengaruh Amerika Serikat di dunia.

Faktor *national interest* Amerika Serikat merupakan alasan paling kuat mengapa Amerika Serikat mengambil kebijakan tersebut. *Economic interest* merupakan salah satu bentuk *interest* yang Amerika Serikat coba untuk penuhi didalam konflik tersebut. Keberadaan jalur laut di kawasan Laut China Selatan bagi Amerika Serikat sendiri sangat vital, setiap tahunnya, 208 miliar USDollar nilai barang perdagangan Amerika Serikat melewati jalur Laut China Selatan. Amerika Serikat tidak mungkin berdiam diri dan tidak melakukan tindakan jika 14% jalur perdagangan lautnya terancam dengan ambisi China yang ingin menguasai jalur laut tersebut.

Disamping itu Amerika Serikat juga telah dikenal sebagai negara yang “haus” jika menyangkut dengan sumber daya minyak bumi. Dengan adanya cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah di bawah kawasan Laut China Selatan, maka wajar bila Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan akan minyak bumi begitu tinggi bertujuan untuk menguasai cadangan sumber daya yang ada di Laut China Selatan. Jika China berhasil menguasai kawasan tersebut, maka Amerika Serikat akan kehilangan kesempatan untuk dapat mengeruk kekayaan alam disana.

China yang telah tumbuh dalam bidang ekonomi melampaui Amerika Serikat, juga membawa kekhawatiran sendiri bagi Amerika Serikat. Baik IMF maupun World Bank sama-sama menempatkan China sebagai negara dengan perekonomian terkuat dunia saat ini. Selain itu, IMF dan World Bank juga memprediksikan bahwa selain unggul dari Amerika Serikat dalam segi PPP, China juga memiliki potensi untuk mengungguli perekonomian Amerika

Serikat dalam aspek-aspek lain. Tindakan Amerika Serikat masuk kedalam konflik Laut China Selatan merupakan suatu bentuk upaya untuk mencegah ekonomi China berkembang lebih pesat lagi. *Economic interest* Amerika Serikat didalam konflik Laut China Selatan adalah untuk memenangi *economic race* dengan China dan mempertahankan posisinya sebagai negara ekonomi terkuat dunia. Dengan spekulasi bahwa negara-negara yang saat ini menjadi mitra Amerika Serikat akan berpaling kepada China jika China berhasil menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara ekonomi terkuat dunia, maka hal itu dapat mengancam pengaruh Amerika Serikat dimata dunia, bahkan akan mengancam kelangsungan ekonomi dan stabilitas Amerika Serikat.

Selain bersaing dalam *economic race*, China dan Amerika Serikat sama-sama bersaing untuk satu hal penting lainnya, yaitu *World order interest*. Baik Amerika Serikat maupun China sama-sama memiliki sisi historis sebagai negara yang menanamkan hierarki ke negara-negara sekitarnya dan sama-sama memiliki kecenderungan untuk menempati posisi puncak hierarki tersebut. Kebangkitan China dalam dua dekade terakhir sedikit banyak telah mengubah *power position* di Asia. China telah menjadi partner ekonomi utama bagi hampir semua negara-negara di Asia.

Meskipun China telah menjadi ancaman yang nyata bagi Amerika Serikat, namun Amerika Serikat tidak dapat bertindak gegabah karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar jika Amerika Serikat melakukan konfrontasi langsung dengan China. Amerika Serikat membutuhkan strategi untuk tetap dapat memonitor dan meredam kekuatan China tanpa merusak hubungannya dengan China. Untuk itu, Amerika Serikat membutuhkan aliansinya Filipina sebagai motif menjalankan kepentingannya tersebut.

Filipina merupakan salah satu negara klaim dalam konflik Laut China Selatan. Selain karena memiliki wilayah kedaulatan di kawasan itu, Filipina juga terlibat konflik langsung

dengan China dalam sengketa wilayah laut sebelah barat Filipina yang di juga klaim oleh China. Jika Amerika Serikat melakukan monitor dan kontrol atas China dibalik alasan dukungan sebagai sekutu Filipina, maka Amerika Serikat tidak harus merusak hubungannya dengan China dan ini adalah strategi paling tepat yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Bibliography

Albert, E. (2016, Oktober 21). *The U.S.-Philippines Defense Alliance*. Retrieved November 26, 2017, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/us-philippines-defense-alliance>

Albert, E. (2016, Oktober 21). *The U.S-Phillippines Deffense Alliance*. Retrieved 4 November, 2017, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/us-philippines-defense-alliance>

Asia Maritime Transparency Initiative. (2016, Desember 16). *China's New Spratly Island Defenses*. Retrieved November 26, 2017, from AMTI/CSIS: <https://amti.csis.org/chinas-new-spratly-island-defenses/>

Breadth of the exclusive economic zone, 57 (United Nation Convention on the Law of the Sea 1973).

Breadth of the exclusive economic zone, 57 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1973).

Christopher, L. (1997). From Proponderance to Offshore Balancing. *International Security* 22:1 , 88.

Debussman, B. (2008, September 17). *The Russian bear in America's backyard: Bernd Debusmann*. Retrieved November 6, 2017, from Reuters:

<https://www.reuters.com/article/columns-column-usa-russia-dc/the-russian-bear-in-americas-backyard-bernd-debusmann-idUSLH39192920080917>

Encyclopedia Britannica. (1998, Juli 29). *Cold War*. Retrieved November 26, 2017, from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/event/Cold-War>

Global Fire Power; Credit Suisse. (2017, Februari 1). *Revealed: The most powerful militaries in 2017*. Retrieved November 24, 2017, from Grinberg News: <http://www.grinbergnews.com/powerful-militaries/>

GlobalFirePower.com. (2017). *2017 United States Military Strength*. Retrieved November 2017, 2017, from Global Fire Power: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-states-of-america#powerindex

Haglund, D. G. (1998, July 20). *Britannica Politics*. Retrieved November 4, 2017, from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/alliance-politics>

Harres, C. (2015, Oktober 27). *South China Sea Dispute Timeline: A History Of Chinese And US Involvement In The Contested Region*. Retrieved November 25, 2017, from International Bussines Times: <http://www.ibtimes.com/south-china-sea-dispute-timeline-history-chinese-us-involvement-contested-region-2158499>

Heritage.org. (2017). *2017 Index of U.S Military Power*. Retrieved November 24, 2017, from Heritage.org: <http://index.heritage.org/military/2017/assessments/us-military-power/>

Holsti, O. (2006). The Three-Headed Eagle, The United States and System Change. In *Making American Foreign Policy* (pp. 89-102). New York: Routledge.

Hunt, K. (2016, July 12). *South China Sea: Court rules in favor of Philippines over China*. Retrieved Oktober 8, 2017, from CNN: <http://edition.cnn.com/2016/07/12/asia/china-philippines-south-china-sea/>

Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). In *Introduction to International Relation* (p. 140). New York: Oxford University Press, Inc.

Krishna, A. (2014). *South China Sea: Revival Of The Cold War And Balance Of Power? – Analysis*. Retrieved November 5, 2017, from Institute for Maritime and Ocean Affairs : <http://www.imoa.ph/south-china-sea-revival-of-the-cold-war-and-balance-of-power-analysis/>

Liu, Z. (2016, July 2016). *South China Sea: Hague Case*. Retrieved Oktober 11, 2017, from South China Morning Post: <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1988596/whats-chinas-nine-dash-line-and-why-has-it-created-so>

Lockett, H. (2016, Juli 12). *Timeline: South China Sea dispute*. Retrieved November 25, 2017, from Financial Times: <https://www.ft.com/content/aa32a224-480e-11e6-8d68-72e9211e86ab>

Ma, A. (2016, Februari 26). *Here's What You Need To Know About The South China Sea Disputes*. Retrieved November 25, 2017, from Huffingtonpost: https://www.huffingtonpost.com/entry/south-china-sea-disputes-explained_us_56ccd9ede4b041136f18ad3d

Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making . *British Journal of International Studies Vol. 2, No. 3* , 247.

Part VII Regime of Islands , 121 (United Nations Convention on the Law of the Sea Desember 10, 1982).

Peña, C. V. (2017, Februari 17). *Should America Be the World's Policeman?* Retrieved November 24, 2017, from The American Conservative: <http://www.theamericanconservative.com/articles/should-america-be-the-worlds-policeman/>

Reuters. (2017, Januari 24). *U.S. Vows to Stop Beijing Taking Over South China Sea Islands*. Retrieved November 26, 2017, from TIME: <http://time.com/4644651/u-s-vows-to-stop-beijing-taking-over-south-china-sea-islands/>

Saull, R. (2012). In M. Cox, & D. Stokes, *US Foreign Policy* (p. 61). New York: Oxford University Press.

Simmons, Clive R. (2008). *Historic Waters in the Law of the Sea: A Modern Re-Appraisal*. In C. R. Simmons, *Historic Waters in the Law of the Sea: A Modern Re-Appraisal* (p. 145). Martin Nijhoff Publisher.

Snyder, G. H. (1990). *Theory, Values And Practice In International Relations: Essays In Honor Of William T.R. Fox*. *Journal of International Affairs Vol. 44 No. 1*, 104-105.

Tweed, D. (2016, July 12). *China's South China Sea Claims Dashed by Hague Court Ruling*. Retrieved Oktober 4, 2017, from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-12/china-no-historic-right-to-south-china-sea-resources-court-says>

U.S Library of Congress. (1991). *Relations with the United States*. Retrieved November 27, 2017, from [Countrystudies](http://countrystudies.org).

United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (2014, Desember 5). *Limits in the Seas, p. 143*. Retrieved November 2, 2017, from [Limits in the Seas - US Department of State: https://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf](https://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf)

Waltz, K. N. (1979). In *Theory of International Politics* (p. 113). Illinois: Waveland Press, Inc.

Watkins, D. (2016, Februari 29). *What China Has Been Building*. Retrieved Oktober 16, 2017, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-building-in-the-south-china-sea-2016.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Asia%20Pacific&action=keypress®ion=FixedLeft&pgtype=Multimedia>

Xinhua News Agency. (2012, April 16). *China urges Phillipine archeological vessel to leave Huangnyan Island*. Retrieved November 26, 2017, from Xinhua News Agency: http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/16/c_131530295.htm